



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP : BKAD/32/IX/2024
TGL. PEMBUATAN : 19 September 2024
TGL. REVISI : 1 Agustus 2025
TGL. EFEKTIF : 20 Agustus 2025

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Drs. Salvador Pinto
NIP.19740715 199403 1 005

NAMA SOP

Penyusunan Perda Perbup Pertanggungjawaban APBD

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Proses Pelaksanaan APBD
2. Memahami Laporan Realisasi Anggaran
3. Mampu mengoperasikan aplikasi microsoft excel
4. Memiliki sikap teliti, akurat.
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

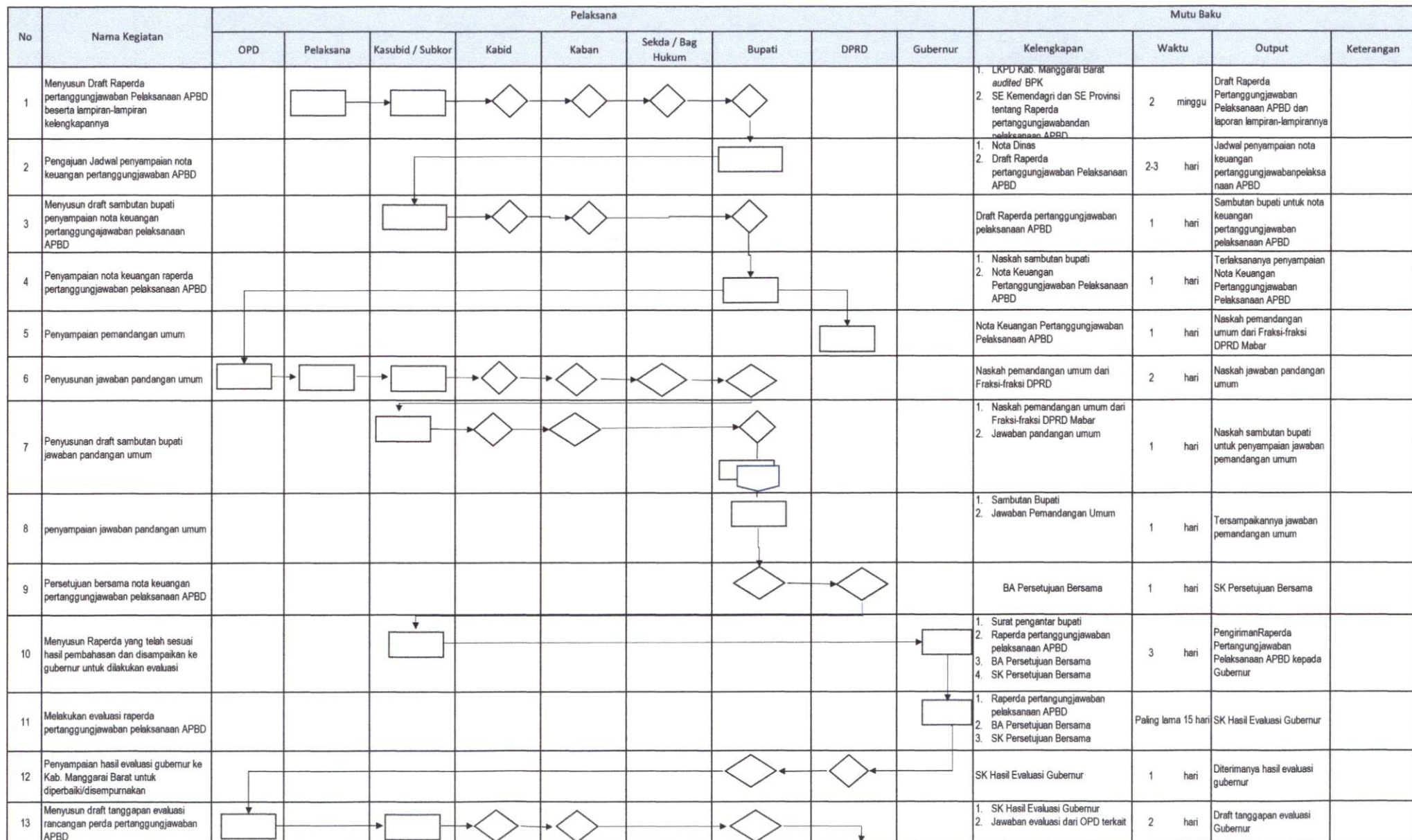
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN

Apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi proses selanjutnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya



No	Nama Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			
		OPD	Pelaksana	Kasubid / Subkor	Kabid	Kaban	Sekda / Bag Hukum	Bupati	DPRD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
14	Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										Draft tanggapan evaluasi Gubernur	1 hari	1. BA Penyempurnaan evaluasi Gubernur 2. SK Penyempurnaan evaluasi Gubernur	
15	Menetapkan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang sudah dibahas dengan DPRD menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										1. Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2. BA Penyempurnaan evaluasi Gubernur 3. SK Penyempurnaan evaluasi Gubernur	1 hari	Draft Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
16	Mengirim Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai Barat										1. Surat Pengantar 2. Perda dan Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3. SK Evaluasi Gubernur 4. BA Persetujuan Bersama 5. SK Persetujuan Bersama 6. BA Penyempurnaan evaluasi Gubernur 7. SK Penyempurnaan evaluasi Gubernur, dll	2 hari	Terlaksananya proses pengajuan nomor registrasi perda	
17	Penelitian aspek yuridis formal dan membuat penomoran Perda dan Perbup APBD										1. Surat Pengantar 2. Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3. SK Evaluasi Gubernur 4. BA Persetujuan Bersama 5. SK Persetujuan Bersama 6. BA Penyempurnaan evaluasi Gubernur 7. SK Penyempurnaan evaluasi Gubernur, dll	3 hari	teregistrasinya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
18	Melaksanakan penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD dalam lembaran Daerah										Perda Pertanggungjawaban APBD yang telah diregistrasi	1 hari	Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	
19	Menggandakan dan mendistribusikan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada SKPD, DPRD, TAPD, BPK RI Perwakilan NTT, Kanwil DJPB NTT dan Gubernur NTT											9 hari		